

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang diuraikan pada bab terdahulu, yakni pada bab pertama hingga pada bab terakhir, sebagai jawaban dari rumusan masalah setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah pangkalan militer sekutu yang berada di daerah Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Politik yang dipakai untuk mempermudah masuk ke Indonesia adalah dengan cara pendekatan agama. Sesuai dengan ajaran “*Shinto*” yang menganggap bahwa semua umat manusia di Dunia ini adalah sarumpun dan perlu adanya penyatuan dalam satu kesatuan kekaisaran.

Upaya lain mempermudah melegitimasi masyarakat Indonesia adalah pada permulaan Jepang mendarat di Jawa, sebuah organisasi keagamaan diberikan untuk kalangan umat Islam yaitu *Shumubu* (Departemen Agama Pusat) dan *Shumuka* (Departemen Agama Daerah) pada tahun 1944. Ketika semua organisasi dibekukan pada 1942, Jepang tetap memberikan ruang gerak pada MIAI meskipun tetap dalam pengawasan yang ketat.

2. Memasuki era ke-2 pada tahun 1943, dalam Perang Dunia II Jepang berada pada pihak yang bertahan. Jepang lebih membutuhkan tambahan kekuatan pada kondisi ini. Untuk menyokong berlangsungnya kelancaran Perang Asia Timur Raya, Jepang memberikan kebebasan berpolitik kepada masyarakat Indonesia. Di Jawa dalam bidang militer dibentuk PETA pada September 1943. Dalam bidang politik, di bulan yang sama Jepang membentuk sebuah parlemen seperti *Volskard* pada masa Hindia Belanda yaitu Badan Penasehat Pusat atau yang biasa disebut dalam bahasa Jepangnya *Chuo Sangi-in*

Chuo Sangi-in bertugas untuk menjawab usulan dari *Saiko Shikikan* (Panglima Tertinggi Militer) yang berkaitan dengan persiapan masyarakat Indonesia untuk ikut andil dalam Perang Asia Timur Raya, kemudian merapatkan dan hasilnya direalisasikan kepada masyarakat Indonesia guna kepentingan Perang Asia Timur Raya. Terdapat enam wakil tokoh Islam yang menjadi anggota parlemen ini. Di antaranya adalah K.H. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Abdul Halim yang diangkat langsung oleh Jepang dan Ir.H. Sufyan (*Jakarta Syi*) dan R.H. Fatchurrahman (*Bojonegoro Syu*).

3. Dari enam tokoh Muslim dalam Badan Penasehat/*Chuo Sangi-in*, peneliti hanya membahas empat tokoh yang ditunjuk langsung oleh *Saiko Shikikan*. Keberadaan empat tokoh ini sangat berpengaruh untuk memberikan bantuan terhadap Jepang guna Perang Asia Timur Raya dan usaha untuk kemerdekaan Indonesia. peran mereka selama menjadi anggota *Chuo Sangi-in* adalah,

mengaktifkan kembali organisasi keagamaan yang sebelumnya dibekukan oleh Jepang di awal pendudukannya.

K.H.Wahid Hasyim (NU), K.H. Mas Mansur dan Ki Bagu Hadikusumo (Muhammadiyah) memanfaatkan posisinya dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk melakukan diplomasi, kemudian menyarankan untuk mengaktifkan kembali NU dan Muhammadiyah. Pada akhir bulan November permintaan itu dikabulkan oleh Jepang. Sedangkan K.H. Abdul Halim memanfaatkan posisinya dalam Badan Penasehat Pusat *Chuo Sangi-in* untuk mengaktifkan kembali Perserikatan Ulama. Permintaan K.H. Abdul Halim dikabulkan Jepang pada 1 Februari 1944 dengan diganti Perserikatan Umat Islam. Dalam persidangan *Chuo Sangi-in*, mereka selalu memberikan usulan yang berkaitan dengan ajaran Islam dalam upaya mencapai kemerdekaan dan peran mereka sebagai anggota dalam *Chuo Sangi-in* di luar sidang untuk upaya kemerdekaan Indonesia adalah membentuk Masyumi dan Hizbullah.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti melihat bahwa Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in* merupakan lembaga tertinggi di Jawa dan Madura pada masa Jepang. Bisa dikatakan MPR seperti masa sekarang. Namun tugasnya adalah memberikan jawaban atas usul dari pemerintahan Jepang dan hasilnya disarankan kepada masyarakat Jawa dan Madura untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dan

mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski keberadaan badan ini sangat berpengaruh pada tahun 1943-1945 dalam melakukan perjuangan dan pergerakan di Jawa dan Madura untuk kemerdekaan Indonesia, namun secara tidak langsung kebijakan mereka dari hasil rapat sidangnya memaksa masyarakat untuk menaati kebijakan Jepang. Kebijakan *Rhomusa*, penyetoran kekayaan kepada Jepang, dan kerja keras dalam militer juga merupakan persetujuan dari setiap anggota dalam persidangnya. Sebenarnya Badan *Chuo Sangi-in* ini baik sebagai pendidikan politik pemerintahan tokoh Indonesia dan usaha mencapai kemerdekaan, namun yang kurang baik adalah memberikan tugas yang berat kepada masyarakat untuk menaati kebijakan-kebijakan Jepang guna kepentingan Asia Timur Raya, meski pada akhirnya hal ini sangat membantu masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang Sejarah Islam pada masa pendudukan Jepang, belum tentu memberikan hasil yang sempurna. Namun demi menunjang progresifitas intelektual di IAIN Sunan Ampel Khususnya dan di Universitas-Universitas lain umumnya, karya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pengetahuan kaitannya dengan kondisi Islam pada masa pendudukan Jepang.

Jika dari hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan ataupun tentang informasi yang berkaitan dengan Islam Masa pendudukan Jepang, maka bisa dilakukan pengkajian ulang dengan lebih mendalam untuk menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti tuliskan dalam karya ini.